**BAB I**

1. **Latar Belakang**

Perang Dingin antara blok barat dan blok timur telah berakhir pada tahun 1990 ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet yang terbagi menjadi beberapa negara yang salah satunya adalah Rusia sebagai wilayah atau negara terbesar pecahan Uni Soviet. Namun,pecahnya Uni Soviet tidak merubah persaingan antara blok barat dan blok timur yang kini oleh Rusia dan Amerika Serikat. Pasca Perang Dingin merupakan babak baru bagi kedua negara adidaya dalam memperluas pengaruhnya baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, militer dan ideologi. Persaingan antara kedua negara tersebut menjadi sebuah persaingan hegemoni di suatu kawasan contohnya kawasan Timur Tengah.

Timur Tengah merupakan wilayah yang sarat akan masalah keamanan dan konflik. Masalah keamanan dan konflik yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya dalam dimensi konflik internal negara, konflik antar-negara, baik sesama Negara-negara Arab, ataupun keterlibatan negara-negara non-Arab. Berbagai konflik yang berkecamuk di Timur Tengah dengan resolusi konflik yang minim, bukan hanya berpengaruh terhadap citra kawasan ini sebagai wilayah konflik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan internasional.[[1]](#footnote-2)

Suriah menjadi salah satu Negara yang mengalami konflik berkepanjangan, baik konflik Internal maupun Eksternal. Konflik Suriah melibatkan aktor *State* hingga *Non-State* di dalamnya. Sehingga pencapaian atas resolusi konflik di Negara tersebut sangatlah minim.

Pada awalnya konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik internal yang terjadi antara pemerintah Bashar Al Assad kedua, yang merupakan anak dari presiden Al Assad yang pernah memerintah sebelumnya. Konflik bermula sejak terjadinya banyak konflik di beberapa negara di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah *Arab Spring*. Sebagian besar warga negara di kawasan Timur Tengah melakukan demostrasi kepada pemerintah yang berkuasa untuk menuntut menghentikan rezim yang berkuasa. Konflik di Suriah bermula ketika pada tanggal 26 Januari 2011 terjadi demostrasi oleh warga Suriah.

Pada tanggal tersebut salah satu warga Suriah melakukan aksi bunuh diri dengan cara melakukan bakar diri. Aksi ini dilakukan untuk menuntut penghentian Rezim Al-Assad yang dianggap warga Suriah sebagai pemimpin yang otoriter. Rakyat menuntut pemberhentian undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak 1963, meskipun undang-undang tersebut telah diamandemen beberapa kali tetapi hal tersebut dianggap masih tidak memnuhi kepentingan rakyat yang menginginkan sistem pemerinthan yang demokrasi seutuhnya. Berdasarkan laporan mantan anggota kepolisian Suriah, pemerintah negara in telah melakukan tindakan *holocaust*.[[2]](#footnote-3)

Tuntutan lainnya adalah diterapkannya sistem multipartai, dan juga kebebasan yang lebih bagi rakyat. Rakyat Suriah hanya menginginkan penghentian rezim Bashar Al-Assad dan pembentukan pemerintah yang sama sekali baru berdasarkan pemilu yang demokratis. Rakyat Suriah juga meminta pemerintah Bhasar untuk mengentikan dukungannya terhadap Iran dan Lebanon yang sedang mengalami konflik internal. Warga Suriah tidak menginginkan pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap kedua negara tersebut karena dukungan yang diberikan tidak memberikan dampak positif bagi Suriah dalam politik Internasional.

Krisis Suriah dimotori oleh gerakan oposisi melawan pemerintah yang dinilai sebagai aristokrasi modern yang rakyat tidak lagi terpenuhi aspirasinya. Sehingga, tindakan protes untuk menurunkan pemerintah dalam bentuk demonstrasi turun ke jalan, literasi media, dan cara-cara militer, ditempuh oleh oposisi. Proses penurunan rezim Bashar Al-Assad yang telah berdiri sejak awal 2000-an oleh rakyat Suriah ini telah memakan korban puluhan ribu nyawa baik dari sipil maupun tentara pemerintah.

Krisis Suriah menjadi medium analisis yang tepat dalam melihat bagaimana kebijakan-kebijakan luar negeri Rusia. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Rusia untuk Suriah menjadi penting untuk dikaji karena kepentingan kepentingan tersebut bisa dijadikan bahan perumusan kebijakan luar negeri Rusia. Sejak kejatuhan Uni Soviet tahun 1991, Rusia merumuskan kembali semua bentuk kebijakan luar negerinya. Rusia memandang bahwa kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang krusial bagi Rusia.[[3]](#footnote-4)

Hubungan Rusia dan Suriah sebenarnya merupakan hubungan lama yang dijalin kembali, hubungan tersebut sudah ada bahkan pada saat Rusia masih berbentuk Uni Soviet dan Suriah masih belum menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia internasional dan PBB pada 17 April 1946. Pada sejarahnya, Rusia meletakkan “Byzantyne Army” di Suriah pada abad ke 10 dan 11, dan setelah perjanjian Carlovitz dengan Ottoman Empire pada 1699 semakin banyak para pendatang Rusia yang mengunjungi Suriah dalam perjalanan mereka ke Palestina dengan berbagai tujuan yang ada, termasuk didalamnya masyarakat Kristen Orthodox.

Hal ini membuat Kekaisaran Orthodox memperluas pengaruhnya hingga membuat sebuah pos konsuler yang beroperasi di Aleppo, Latkia, Beirut, dan Saida pada 1893. Pengaruhnya terus meluas sampai ke Suriah, dimana mereka juga membangun sebanyak tujuh puluh empat sekolah untuk memajukan pendidikan di Suriah pada 1905. Hal ini merupakan awal kedekatan hubungan Rusia dan Suriah yang nantinya akan terus berlanjut di kemudian hari. Seperti contoh, Suriah menjadi salah satu partner yang sangat kronis bagi Uni Soviet yang pada saat itu menjadi salah satu kunci kekuatan Uni Soviet dalam menjaga dominasinya di dunia internasional. Selain itu, Suriah juga menjadi aliansi Uni Soviet untuk mencapai kepentingannya di dunia Internasional, khususnya dalam peran sebagai pintu masuk yang digunakan Uni Soviet untuk masuk ke kawasan Timur Tengah.[[4]](#footnote-5)

Di kawasan tersebut, Uni Soviet yang kini Rusia bisa memulai ambisinya untuk menjadi negara yang berpengaruh mengingat kawasan Timur Tengah adalah kawasan *shatterbelt. Shatterbelt* merujuk pada kawasan geografis dengan dua kondisi yaitu; di dalamnya banyak terjadi konflik lokal dengan atau antara negara-negara kawasan tersebut, dan terdapat keterlibatan beberapa aktor *major power* yang berasal dari luar kawasan tersebut. Timur Tengah sendiri merupakan kawasan yang secara geografis memiliki banyak nilai bagi beberapa Negara berpengaruh seperti Rusia dan AS. Di tambah saat ini, terjadi fenomena *Arab Spring* yang menarik perhatian banyak negara.

*Arab Spring* merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pemberontakan seperti demonstrasi, protes, dan konflik bersenjata. Pemberontakan tersebut dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah lokal yang dinilai diktator, monarki-absolut, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada rakyatnya sendiri. Keterlibatan dua aktor luar lainnya yaitu AS dan Cina untuk menjadi bagian dalam konflik ini merupakan proses pencapaian kepentingan nasional masing-masing termasuk di dalamnya Suriah sendiri. Sehingga, kompleksitas krisis di Suriah saat ini tidak lain adalah hasil konversi dari banyak kepentingan. Sebagai contoh, veto yang dijatuhkan oleh Rusia dan Cina atas Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk Suriah bisa menjadi tolak ukur keberpihakan mereka dalam krisis ini.[[5]](#footnote-6) Hak Veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Hak veto dalam sejarahnya hanya dimiliki oleh lima negara tetap Dewan Keamanan PBB. Negara itu antara lain, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dan Republik Rakyat Cina. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB dipilih berdasarkan hasil Perang Dunia II yang kelima negara tersebut merupakan pemenang dari Perang Dunia II.[[6]](#footnote-7) Sementara di lain pihak, Amerika Serikat (AS) dan sekutu yang terkait, tentu merasa sangat tidak nyaman dengan tindakan Rusia dan Cina ini terlebih untuk proses pemulihan hubungan AS-Rusia-Cina. Rusia secara nyata membantu Suriah untuk menghadapi desakan dan campur tangan internasional dalam penyelesaian krisis domestiknya. Sehingga, dengan tegas Rusia menolak segala bentuk sanksi yang bisa memberatkan Suriah termasuk sanksi ekonomi dan politis. Menurut Vitaly Churkin, Duta Besar Rusia untuk PBB, jika Dewan Keamanan menyepakati untuk mengaplikasikan *Chapter 7 Article 41 UN Charter* maka jalan intervensi militer akan terbuka bagi Suriah.

Bersama dengan Rusia, Cina juga sepakat untuk membebaskan Suriah dari jalan intervensi militer Dewan Keamanan. Sehingga, sebanyak tiga kali veto dijatuhkan untuk Suriah. Keterlibatan masing-masing aktor memang didasari oleh kepentingan nasional mereka namun tentu hal tersebut dibarengi dengan kekuatan dan konversi kekuatan mereka. Saat ini Rusia menempati posisi ketiga di bawah AS dan Cina sebagai negara dengan rencana anggaran belanja militer yang tinggi dengan peningkatan sebanyak 53 persen untuk pertahanan nasional sampai tahun 2014. Bahkan, Rusia merencanakan untuk menghabiskan sebanyak 23 trilyun Rubel atau setara dengan USD 794 juta untuk modernisasi militer berupa peningkatan kualitas peralatan, penelitian dan pengembangan, dan sokongan terhadap industri militer Rusia dalam kurun 2011-2020. Salah satu bentuk alokasi dana ditujukan untuk mengganti sekitar 70 persen peralatan militer Uni Soviet dengan peralatan yang lebih modern sampai tahun 2020. *Stockholm International Peace and Research Institute* (SIPRI) yang khawatir dengan ambisi besar ini mengingat dekade stagnan Rusia pasca menderita kejatuhan akhir 1990 lalu. Rusia yang saat ini merupakan negara berbasis ekonomi melihat bahwa keterlibatannya di Suriah merupakan salah satu upaya untuk melindungi investasinya.

Hubungan ekonomi dan militer antara Rusia dan Suriah sudah berlangsung sejak terjadinya Perang Dingin sampai sekarang. Pendirian kamp militer Rusia di Suriah tepatnya di Pelabuhan Tartus pada tahun 1963 menjadi bukti nyata bagaimana eratnya hubungan antara kedua Negara ini. Untuk tahun 2011 saja, kontrak militer Rusia dan Suriah mencapai angka USD 4 milyar6 dan diperkirakan angka ini akan semakin bertambah seiring dengan perkembangan krisis yang semakin meruncing. Instalasi pabrik pemroses gas dan minyak di Suriah juga merupakan salah satu investasi besar Rusia di negara ini. Jumlah investasi ekonomi Rusia dan Suriah secara keseluruhan mencapai USD 2 milyar sampai tahun 2008 sebelum menurun sampai USD 1,36 milyar di tahun 2009 sebagai akibat dari krisis finansial. Ekspor senjata yang dilakukan oleh Rusia ke Suriah banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak terutama pihak Barat yang semakin dipersulit oleh tindakan Rusia ini. Ekspor senjata yang merupakan salah satu komoditas perdagangan Rusia dan Suriah menjadi terlihat semakin potensial setelah Rusia menambah pasukan di Pangkalan Tartus. Penambahan pasukan di Pelabuhan Tartus merupakan salah satu strategi Rusia untuk mengamankan perdagangannya karena kondisi di Suriah dinilai tidak cukup kondusif. Hal ini dinilai pihak Barat sebagai keseriusan Rusia dalam membela Suriah tidak hanya di meja sidang Dewan Keamanan PBB namun langsung di wilayah konflik. Hubungan Rusia dan Suriah bersifat fluktuatif tergantung dengan konstelasi politik saat itu. Selama beberapa tahun, Rusia pernah membekukan hubungan diplomatis dengan Suriah sampai tahun 2000 ketika Presiden Bashar Al-Assad menjabat sebagai presiden.[[7]](#footnote-8)

Perubahan arah politik luar negeri Rusia terhadap Suriah menjadi sesuatu yang perlu dikaji, karena dengan perubahan arah tersebut terdapat kepentingan nasional yang ingin dicapai dikaitkan dengan perubahan kepemimpinan Rusia dari Boris Yeltsin ke Vladimir Putin. Bukan hal itu saja yang menjadi poin analisis, namun tindakan yang dilakukan Rusia untuk Suriah terbilang cukup tegas seperti veto Rusia yang telah dijatuhkan sebanyak tiga kali. Sikap Rusia yang secara tegas membela Suriah dalam Dewan Keamanan PBB dan hubungan bilateral yang semakin baik menjadi satu bentuk kebijakan luar negeri yang harus dianalisis mengenai apa saja kepentingan nasional dibaliknya serta kebijakan turunan untuk itu.[[8]](#footnote-9)

Jika dilihat dari geopolitik dan geostrateginya, Kawasan timur tengah merupakan kawasan yang strategis karena kawasan ini merupakan jalur pertemuan dari tiga benua Asia, eropa dan afrika. Dalam perkembangan politik luar negerinya Amerika Serikat sebagai negara adidaya secara terang-terangan telah terlibat dalam gejolak politik dan keamanan di kawasan timur tengah. Keterlibatan Amerika Serikat dalam politik negara-negara di kawasan Timur Tengah memiliki beberapa faktor kepentingan diantaranya; faktor ekonomi, faktor politik, keamanan dan militer.[[9]](#footnote-10)

Konflik antara pemerintah dengan kelompok oposisi yang merupakan rakyatnya sendiri tersebut telah banyak mendapat respon dari masyarakat internasional karena sikap pemerintah Suriah yang menggunakan kekerasan untuk menyerang rakyat nya sendiri. Salah satu negara yang bereaksi atas apa yang terjadi di Suriah adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama periode kedua sejak awal mengambil sikap yang jelas yakni tidak mendukung Bashar al Assad untuk tetap memimpin Suriah.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, misalnya dalam pidatonya pada Agustus 2011 lalu, Presiden Obama menyatakan bahwa sudah saatnya Presiden Assad untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan masa depan Suriah harus ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri.1 Sebelum itu, tepatnya pada bulan April, Mei dan Agustus 2011, Presiden Obama telah mengeluarkan *Executive Order* (E.O) yang berisi perintah untuk membekukan semua asset Pemerintah Suriah yang berada di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat dan melarang warga Amerika Serikat untuk melakukan investasi, mengekspor barang ke Suriah, mengimpor produk petroleum dari Suriah, serta melakukan transaksi bisnis lainnya dengan Suriah

Melalui forum Dewan Keamanan (DK) PBB, pada bulan Oktober 2011 dan Juli 2012 lalu, Amerika Serikat juga mendukung draf resolusi yang berisi kecaman terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Bashar al Assad dan pemberian sanksi terhadap Suriah, tapi gagal diadopsi karena diveto oleh Rusia dan China. Di lapangan, Amerika Serikat memberikan bantuan *non*-*lethal aid* kepada kelompok oposisi *Free Syrian Army* (FSA) berupa obat-obatan, makanan, dan alat komunikasi. Hal ini dilakukan agar kelompok oposisi tetap bisa berjuang melawan Pemerintah Suriah yang mendapat dukungan dari Rusia dan Iran.

Melalui forum *The Group of Friends of the Syrian people* atau biasa disebut *Friends of Syria*, Amerika Serikat bersama negara-negara lain yang mendukung transisi ke demokrasi di Suriah melakukan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan situasi di Suriah dan mengambil langkah-langkah konkrit sebagai respon terhadap perkembangan tersebut. Sejak pertemuan kali pertama nya di Tunisia pada tahun 2012 lalu hingga tahun 2014 ini, *Friends of Syria* telah mengadakan beberapa kali pertemuan. Dari pertemuan tersebut dicapai berbagai kesepakatan penting seperti pengakuan kelompok oposisi yang secara resmi dianggap sebagai perwakilan rakyat Suriah, dukungan terhadap perjuangan kelompok oposisi, pemberian bantuan keuangan kepada kelompok oposisi yang diakui, dan pemberian sanksi ekonomi kepada pemerintah Bashar al Assad.

Berhembusnya kabar bahwa pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia untuk menyerang kelompok oposisi pada awal tahun 2013 lalu menyebabkan Presiden Obama memikirkan untuk mengintervensi langsung konflik di Suriah dan mempersenjatai kelompok oposisi. Menurut Presiden Obama, penggunaan senjata kimia dapat menjadi “*game changer*” bagi sikap Amerika Serikat terhadap konflik di Suriah. Amerika Serikat telah menentukan garis merah *(red line)* dalam konflik Suriah dimana saat ditemukan bukti penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah, berarti garis merah telah dilanggar dan Amerika Serikat akan mengambil langkah yang lebih tegas. Pada Kamis, 13 Juni 2013, Amerika Serikat membuktikannya, Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan bantuan senjata kepada kelompok pemberontak/oposisi setelah Amerika Serikat meyakini dan memiliki bukti bahwa Presiden Assad menggunakan senjata kimia untuk melawan kelompok oposisi.2 Senjata yang akan dikirim adalah senjata kecil, amunisi, dan mungkin senjata anti-tank. Selain mempersenjatai kelompok oposisi, Presiden Obama juga merencanakan *limited military strike* terhadap Suriah sebagai bentuk hukuman atas penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri. Namun, kemudian Presiden Obama meminta kongres untuk menunda voting terkait pemberian kewenangan untuk mengintervensi Suriah secara militer. Hal ini karena Presiden Obama setuju dengan usulan Rusia terkait pengambilalihan dan penghancuran senjata kimia Suriah di bawah monitoring internasional serta menempuh upaya perundingan damai antara kelompok oposisi dengan pemerintah Suriah.

Sikap Amerika Serikat dalam konflik di Suriah ini menarik untuk diteliti setidaknya karena tiga alasan, yaitu pertama, minimnya dukungan publik Amerika Serikat terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah, apalagi sampai mempersenjatai mereka dan melakukan serangan militer terhadap Suriah. Berdasarkan survei pada bulan Mei 2013 yang dilakukan oleh beberapa media ternama di Amerika Serikat seperti seperti *The New York Times,* menunjukkan 61% responden berpendapat bahwa AS tidak memiliki tanggungjawab untuk terlibat dalam konflik Suriah, 28% menyatakan punya, dan 10% menjawab tidak yakin. Survei yang digelar *Fox News* menghasilkan 68% responden berpendapat bahwa AS tidak seharusnya lebih jauh terlibat walaupun terdapat krisis kemanusiaan di Suriah sekalipun, 23% menyatakan AS untuk lebih terlibat, dan 9% menjawab tidak yakin. Terkait mempersenjatai kelompok oposisi, *Huffington Post* menayangkan hasil surveinya yang menunjukkan 51% warga AS berpikir pemerintah AS tidak seharusnya mempersenjatai kelompok oposisi, 12% menjawab setuju, dan 37% menjawab tidak yakin.

Alasan kedua adalah pengalaman sejarah di masa lalu saat Amerika Serikat mempersenjatai kelompok mujahidin Afganistan untuk membantu mengusir tentara Uni Soviet yang menduduki Afganistan di tahun 1979. Bantuan Amerika Serikat pada waktu itu memang terbukti berhasil membuat Uni Soviet kewalahan dan akhirnya memutuskan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan di tahun 1981. Akan tetapi, mempersenjatai mujahidin Afganistan ternyata memiliki efek samping yang buruk. Veteran perang di Afghanistan berubah menjadi kader gerakan islam ekstrimis di Mesir, Algeria, West Bank, dan tempat lainnya. Sebagian dari mereka telah terlibat dalam insiden teror anti barat, termasuk pengeboman *World Trade Center*.

Alasan ketiga adalah kelompok oposisi di Suriah yang berjuang untuk menggulingkan Presiden Bashar al Assad memiliki latar belakang dan ideologi perjuangan yang sangat beragam, mulai dari yang moderat hingga ekstrimis. Amerika Serikat perlu mempertimbangkan secara matang keputusannya untuk mengirimkan senjata kepada kelompok oposisi yang diakuinya dan dinilainya moderat, sebab perkembangan situasi di lapangan konflik sangat memungkinkan untuk terjadinya perubahan-perubahan yang tidak diinginkan seperti kelompok jihad merebut senjata kelompok FSA atau bahkan anggota kelompok FSA yang membelot dan bergabung dengan kelompok jihad.

Sikap Amerika Serikat dalam konflik di Suriah ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa latar belakang seperti hubungan Amerika Serikat dengan Suriah di bawah pemerintahan Presiden Assad yang tidak baik. Hubungan keduanya mulai memburuk saat Amerika Serikat menginvasi Afghanistan tahun 2001 dan Iraq tahun 2003 sebagai bagian dari *war on terrorism*. Suriah tidak mendukung invasi tersebut dan justru membantu masyarakat Iraq loyalis Saddam Hussein untuk melawan pendudukkan tentara Amerika Serikat di Iraq. Selain itu, Suriah yang sudah masuk dalam daftar negara yang mensponsori terorisme Amerika Serikat sejak 19795 ini juga dikategorikan dalam negara *axis of evil* melalui *National Security Council (NSC) Presidential Directive*-17 yang diterbitkan pada Desember 2002 lalu. Dengan predikat tersebut, bersama Iran, Irak, Korea Utara, dan Libya, Suriah menjadi negara yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai negara yang mensponsori terorisme dan ditengarai mengembangkan senjata pemusnah missal.

Selain itu, juga karena hubungan Suriah yang semakin memburuk dengan Israel, sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah, pasca perang 1967 saat Israel berhasil merebut dataran tinggi golan dari Suriah dan mendudukinya sampai sekarang. Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk mendamaikan kedua nya karena Suriah dan Israel sama-sama memiliki persyaratan mendasar terkait normalisasi hubungan keduanya. Suriah mengajukan prasyarat pengembalian dataran tinggi Golan dan daerah lain yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 untuk mau berdamai dengan Israel, sementara Israel menolak prasyarat yang diajukan Suriah dan mengajukan prasyarat untuk Suriah agar tidak berhubungan dengan Iran, Hezbollah, dan organisasi rakyat Palestina tertentu terutama Hamas.

Namun, Suriah pun juga menolaknya. Perdamaian yang belum terwujud diantara kedua negara ini membuat Amerika Serikat khawatir akan keamanan Israel dari serangan kelompok-kelompok militan yang didukung oleh Suriah. Hal lainnya adalah legitimasi politik Presiden Assad saat memerintah Suriah yang cenderung menurun dari tahun ke tahun akibat tiga persoalan utama yakni otoritas *(authority)*, identitas *(identity),* dan persamaan *(equality)7*.Dari segi otoritas, Presiden Assad memang terpilih melalui pemilihan umum, tapi pada saat itu tidak ada calon lain yang selain Bashar al Assad. Sementara dari segi identitas, Bashar al Assad berasal dari kelompok shiah alawiyah yang hanya sebagian kecil dari mayoritas penduduk Suriah yang beragama Islam sunni dan dari segi persamaan, baik ayah maupun anak sama-sama membedakan perlakuan antarmasyarakat yang beragama Islam shiah dan Islam sunni. Ketiga hal itulah yang kemudian membuat rakyat Suriah menginginkan adanya pergantian rezim.[[10]](#footnote-11)

Melalui intervensi, Amerika Serikat menerapkan prinsip *interest of the local population* (kepentingan penduduk setempat) yaitu intervensi asing untuk melindungi kepentingan penduduk lokal yang sedang mengalami penyiksaan, dan dari kekuatan - kekuatan tertentu. Kedatangan militer Amerika Serikat ke Suriah dianggap untuk menyelematkan penduduk sipil dan memanfaatkan konflik politik di Suriah itu menjadi kepentingan yang terselubung, yaitu wilayah Timur Tengah khususnya pada Suriah memiliki kepentingan yang sangat besar bagi AS dan sekutunya. Mereka tak ingin menutup wilayah tersebut karena dua alasan sumber daya yang sangat berlimpah seperti minyak dan gas.[[11]](#footnote-12)

Dengan adanya dua sikap dan respon dari kedua belah pihak, Ancaman dari konflik Suriah sendiri terhadap stabilitas kawasan menjadi luas. Bahkan konflik tersebut menjadi konflik regional berdasarkan kepentingan masing-masing negara, khususnya negara-negara c*ore.* Ancaman tersebut berupa terorisme, dan migrasi pengungsi. Dilain sisi ancaman dari 2 negara hegemon yaitu terganggunya stabilitas kawasan. Atas kebijakan-kebijakan yang di keluarkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan pendapat dan asumsi mengenai permasalahan internal di Suriah itu sendiri. Hal tersebut jelas bahwa konflik di Suriah merupakan konflik kepentingan antara Rusia dan Amerika Serikat dalam hal Politik, Keamanan serta ekonomi. Oleh karenanya penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian :

**” Persaingan Rusia-Amerika Serikat di Timur Tengah dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Kawasan ( Studi Kasus : Konflik Suriah 2011-Sekarang) “**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan dalam Latar Belakang, untuk memudahkan dalam menganalisis masalah , Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana Kepentingan Rusia dan Amerika Serikat sebagai Hegemon di Timur Tengah ?
2. Bagaimana Dampak konflik Suriah bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah ?
3. Bagaimana Respon dan Resolusi Rusia-Amerika Serikat serta Internasional khususnya negara-negara Timur Tengah terhadap Konflik Suriah ?
4. **Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, masalah yang dibahas akan dibatasi dengan berfokuskan pada :

Pembatasan Ruang :

“ **Kebijakan dan Kepentingan Rusia-Amerika Serikat di Suriah yang berimplikasi pada Stabilitas Kawasan ”**

Pembatasan Waktu :

**“ Konflik Suriah Periodesasi 2011-Sekarang “**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

**“ Mengapa Persaingan Rusia-Amerika Serikat di Suriah berimplikasi terhadap Stabilitas Kawasan ?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian tentang persaingan Rusia dan Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya Suriah berimplikasi pada Stabilitas Kawasan, yang diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui kepentingan Rusia dan Amerika di Suriah yang terancam dengan adanya konflik internal.
2. Untuk mengetahui kepentingan negara-negara kawasan Timur Tengah yang terancam dan terganggu oleh Konflik di Suriah.
3. Untuk mengetahui kebijakan Internasional maupun regional dalam merespon konflik Suriah

**2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap orang yang memiliki ketertarikan dengan setiap kebijakan Luar Negeri Rusia dan Amerika Serikat di Timur Tengah, yang dalam penelitian ini di fokuskan pada wilayah Suriah, yang termasuk dalam agenda politik global Rusia dan Amerika Serikat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai hal terkait. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat Skripsi Hubungan Internasional, Program Strata-1, Tahun Akademik 2015-2016.
2. Untuk mengetahui tujuan dari kebijakan Politik Luar Negeri Rusia dan Amerika Serikat di Suriah sebagai Hegemon di Kawasan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Negara-Negara di Kawasan dalam merespon terhadap konflik Suriah.
4. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan.
5. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
6. **Kerangka Teoritis**

Sebagai pedoman untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teoritis yang di dalamnya berisi teori-teori para pakar yang memiliki korelasi dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat, Adapun teori tentang Hubungan Internasional sampai dengan teori yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan, teori perimbangan kekuatan, dan teori konflik yang penulis nilai sesuai dengan objek penelitian yaitu:

**“ Persaingan Rusia-Amerika Serikat di Timur Tengah dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Kawasan ( Studi Kasus : Konflik Suriah 2011-Sekarang ) “**

Ada beberapa konsep dan teori yang digunakan, yang penulis nilai cukup tepat untuk dijadikan acuan dan mendukung asumsi yang nanti akan dijadikan hipotesis. Teori-teori tersebut akan diterapkan melalui pola piker silogisme, yakni pola pikir yang disusun berdasarkan pernyataan premis mayor dan premis minor serta sebuah kesimpulan.

Dinamika hubungan internasional dalam konteks kekinian menggambarkan tentang suatu relitas lebih baik bagi masing-masing anggota. Setiap Negara-bangsa tidak bisa melepaskan diri dari hubungan antar Negara yang melintas batas Negara dimana setiap Negara memiliki masalah yang begitu kompleks dengan Negara lain. Hubungan ini memerlukan koordinasi yang tidak sederhana oleh Karena tiap-tiap Negara memiliki kedaulatan. Hubungan yang terjalin antar Negara tersebut mempunyai tiga pola, yakni **kerjasama (*cooperation*), Persaingan (*Competition*), dan konflik (*conflict*) antar Negara dengan Negara lainnya.**

Dalam *Contemporary Political Science*, terbitan Unesco 1950,

**“ Politik internasional adalah salah satu kajian pokok (core subject) dalam kajian hubungan internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (interest) dan kekuasaan (power).** “

Apabila politik adalah studi tentang *who gets what, when, and how*, maka politik internasional adalah studi mengenai *who gets what, when, and how* dalam arena internasional. Maka itu studi **politik internasional** menurut **Holsti** adalah :

**“ studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan sebagai reaksi atas respon negara lain. “**

Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan prilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi.[[12]](#footnote-13)

Studi politik internasional (world politic) sebenarnya study dari kebijakan politik yang didefinisasikan sebagai rumusan-rumusan, tujuan-tujuan, menentukan kejadian-kejadian yang lebih diutamakan atau melalui tindakan-tindakan tertentu dan tindakan-tindakan yang diambil untuk mengimprementasikan keputusan-keputusan tersebut. Study ini memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha yang menggambarkan kepentingan-kepentingan , tindakan-tindakan atau elemen-elemen kekuasaan dari negara-negara besar.

Ilmu Politik Internasional merupakan suatu displin yang terlahir sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas semua aspek Negara dalam pemerintahan yang dibagi ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. **Fungsi Dalam Negeri, mencakup apresiasi, hukum Negara, teori-teori politik.**
2. **Fungsi Luar Negeri, mencakup Hukum Internasional, Politik Internasional, Organisasi Internasional , Administrasi Internasional, Politik Internasional, Diplomasi, propaganda, konflik-konflik antar Negara).**
3. **Hubungan Geografi, mencakup Pemerintahan nasional, pusat dan daerah** .[[13]](#footnote-14)

Dari pendapat para pakar, politik internasional dan hubungan internasional harus dibedakan. Politik internasional membicarakan keadaan-keadaan politik dimata internasional dalam arti yang sempit yaitu diplomasi, hubungan antar negara, konflik-konflik yang menyangkut dengan politik internasional yang dilatar belakangi dengan menunjukkan hubungan tertentu antara negara-negara yang berdaulat. Hubungan internasional lebih disesuaikan yang mencakup segala macam hubungan antar negara, bangsa dengan kelompok bangsa, dengan masyarakat internasional dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses yang menentukan corak hidup dan bertindak dan berfikir secara manusia.[[14]](#footnote-15)

Jika dikutip dari pernyataan para ahli mengenai teori politik internasional, maka bisa di simpulkan sebagai berikut :

**Menurut Yuan C. Chen seorang pakar politik internasional mengatakan bahwa politik internasional juga dapat disebut politik antar negara yang mencakup interest andaction (kepentingan dan tindakan) dan negara-negara di dunia dalam hubungannyasatu sama lain atau dapat juga disebut sebagai proses interaksi antar negara-negaradan antar organisasi-organisasi internasional.**

**Menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya “Politics Among Nation” mendefinisikan sebagai berikut “International politics like of other politics, power isalways the immediate man control over demands and action of other man”. Politik internasional seperti semua politik lainnya, kekuasaan adalah tujuan utamanya,manusia mengontrol tindakan manusia lainnya.[[15]](#footnote-16)**

Maka dari itu konflik Internal Suriah yang telah berkembang menjadi konflik Inter-State Negara-Negara yang mempertahankan kepentingan untuk tujuan nasionalnya. Konflik Inter-State yang meliputi Negara-Negara besar di dalamnya yakni Rusia, dan Amerika serikat serta Negara-negara aliansi Amerika Serikat di Timur Tengah yakni Turki, Arab Saudi, Israel hingga Organisasi Internasional NATO. Dengan permasalahan tersebut, maka negara-negara besar serta kawasan telah melakukan intervensi secara langsung. Menurut para ahli bahwa konflik suriah bukan hanya masalah intervensi melainkan masalah lainnya yang mengakibatkan ancaman keamanan dan stabilitas kawasan. Jika ditinjau dari teorinya maka,

**Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula**.[[16]](#footnote-17)

 Menurut **Wese Becker** “ **konflik merupakan proses sosial dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan”.**

 Selain itu **KJ Holsti** mengemukakan “ **konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisir muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap permusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu ”.** [[17]](#footnote-18)

 Menurut **Paul Conn**, situasi konflik pada dasarnya dapat terbagi menjadi dua, yaitu :

1. ***Zero Sum Game* (konflik menang-kalah)**, merupakan **konflik yang bersifat antagonistik, sehingga tidak memungkinkan adanya kompromi maupun kerjasama antar pihak yang terlibat dalam konflik.**
2. ***Non Zero Sum Game* (konflik menang-menang)**, **merupakan situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih memungkinkan untuk melakukan kompromi dan kerjasama.[[18]](#footnote-19)**

 Berdasarkan pengertian konflik diatas, konflik yang terjadi di Suriah merupakan jenis konflik ***Zero Sum Game*** Karena baik pihak pemerintah Suriah maupun pihak pemberontak tidak dapat menemukan kata sepakat dalam penyelesaian konflik internal tersebut. Kedua belah pihak menginginkan adanya pemenuhan tuntutan maupun ada salah satu pihak yang diminmalisir posisi politiknya. Posisi Rusia dan Amerika serikat yang memiliki pandangan perbedaan mengenai resolusi di Suriah tidak memungkinkan adanya kerjasama dalam penanganan konflik tersebut. Keterlibatan Rusia hanya memperuncing permasalahan hingga meluas dalam pandangan Amerika Serikat dan Kawasan Timur Tengah.

 Sumber-sumber konflik, yang merupakan tujuan utama dalam sebuah negara, antara lain:

1. **Konflik kehormatan nasional**
2. **Imprealisme regional**
3. **Konflik pembebasan atau perang revolusioner**
4. **Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah atau mrempersatukan suatu negara yang terpisah.**

Tipe-tipe konflik yang termasuk dalam konflik internal antara lain:

1. **Perang sipil**
2. **Konflik anti koloni (penjajah)**
3. **Konflik antar pemerintah dengan kekuasaan non pemerintah**
4. **Konflik untuk menjatuhkan kebijakan pemerintah**
5. **Konflik antar pemerintah dengan wilayah pecahannya**
6. **Konflik etnis**
7. **Perang anti imperialism**
8. **Perang untuk mengisi kekosongan dalam kegagalan Negara**

 Konflik dapat meliputi tindakan ancaman, kekerasan, dan hukuman yang bersifat diplomatik, propaganda, komersial atau militer. Konflik dapat meliputi krisis, persilihan maupun persaingan. Unsur utama konflik dimana suatu gerak oleh suatu negara dalam suatu bidang isu dianggap sebagai suatu kerugian atau ancaman oleh pihak lain. Kebanyakan konflik kecil banyak terjadi di negara sedang berkembang, suatu kawasan yang ditandai berbagai pertikaian, wilayah dan pertentangan ideologis. Suatu kecenderungan menyatakan bahwa negara besar cenderung kepada negara perang daripada negara kecil, karena negara yang kecil tersebut tidak lebih pandai dalam membuat ancaman.[[19]](#footnote-20)

 Berdasarkan pengertian diatas konflik yang terjadi di Suriah merupakan jenis konflik yang sesuai dengan tipe konflik (c), yaitu karena konflik tersebut melibatkan pemerintahan yang berkuasa dengan pihak non pemerintah yaitu pihak oposisi yang menginginkan adanya penggulingan pemerintahan yang berkuasa serta terbentuknya negara yang demokrasi. Konflik tersebut jelas mengundang perhatian bagi Negara yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut yang menjadikan konflik tersebut melebar ke tahap konflik Inter-state antara Rusia dan Amerika Serikat.

 **Galtung** berpendapat bahwa terdapat 3 komponen yang harus muncul bersama-sama dalam sebuah konflik total. Sebuah sturktur konflik tanpa sikap atau perilaku merupakan sebuah konflik laten. Galtung melihat konflik sebagai proses dinamis dalam sturktur sikap dan perilaku secara konstan berubah dan mempengaruhi satu sama lainnya. ketika konflik muncul konflik menjadi formasi, ketika kepentingan pihak-pihak yang bertikai masuk kedalam konflik atau hubungan dimana mereka berada sebagai penindas.[[20]](#footnote-21)

 Keberlanjutan atas konflik internal tersebut ditindak lanjuti oleh Negara-negara besar. Yang melakukan sebuah keterlibatan baik teknis, maupun non-teknis.

 ***Intervensi***merupakan **keterlibatan kekerasan dalam menjelaskan secara penuh tentang metode dan alat dimana berbagai pihak ketiga dapat terlibat dalam masalah dalam negeri negara lain yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan internal maupun eksternal negara lain.**

Menurut mahkamah internasional (Marbun,2003:233.), suatu intervensi dilarang hukum internasional apabila:

1. **Merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah dimana setiap negara dibolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas.**
2. **Campur tangan itu meliputi gangguan terhadap negara lain dengan cara paksa, khususnya kekerasan, memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap aktifitas-aktifitas subversife terhadap negara yang menjadi tujuan intervensi tersebut.**

Dalam politik internasional dikenal suatu istilah *intervensi*. *Intervensi* merupakan

**suatu tindakan campur tangan dari negara luar dalam berbagai bidang yaitu ekonomi, politik, maupun militer terhadap urusan dalam negeri negara lain**.

Intervensi juga dimaksudkan untuk membantu mengatasi suatu konflik baik konflik nasional maupun konflik internasional. Berdasarkan hukum internasional intervensi dapat dibenarkan secara hukum jika, negara yang diintervensi telah diberikan hak berdasarkan perjanjian:

1. **Jika negara tersebut melanggar kesepakatan untuk melaksanakan kebijakan bersama yang telah dilakukan secara unilateral.**
2. **Intervensi dianggap perlu untuk melindungi warga negaranya.**
3. **Intervensi dianggap perlu untuk mempertahankan diri.**
4. **Negara yang bersangkutan telah melanggar hukum internasional.**

Menurut pengertian intervensi atau keterlibatan suatu negara diatas, intervensi yang dilakukan oleh Rusia terjadi guna melindungi kepentingan negara tersebut di Suriah. Kepentingan yang berupa hegemoni, *Balance of Power* di kawasan, serta perdagangan persenjataan. Karena Suriah merupakan mitra strategis Rusia di kawasan Timur-Tengah. *Intervensi* yang dilakukan Rusia untuk menjamin bahwa Suriah tetap berada dalam *status quo*. Namun Amerika memiliki kepentingan lain terhadap Suriah dimana negara-negara kawasan Timur Tengah merasa terancam akan kehadiran militer Rusia serta bantuan teknis lainnya di Suriah.

Adapun bentuk intervensi ada dua yaitu:(Marbun, 2003: 233)

1. **Intervensi militer, ada beberapa bentuk intervensi meliputi aksi tunggal dari pemerintah individu, koalisi khusus yang berkepentingan, operasi dana PBB, untuk menjaga perdamaian regional atau pasukan perdamaian yang dipimpin oleh organisasi keamanan regional.**
2. **Intervensi diplomatik, yaitu penyelasian konflik dengan cara perundingan dengan pihak-pihak yang berkonflik.[[21]](#footnote-22)**

Intervensi menurut **K.J Holsti**, yaitu

**tindakan radikal terhadap negara lain tanpa adanya izin dari pemerintah yang berkuasa melalui tindakan yang dapat berupa campur tangan diplomatik, memamerkan kekuatan, pemberontakan atau subversi perang gerilya serta penggunaan kekuatan militer**.

Campur tangan dalam urusan internal negara berdaulat adalah norma dasar dari hukum internasional. *Intervensi* mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi urusan dalam negara lain yang berdaulat. [[22]](#footnote-23)

Menurut **KJ.Holsti** terdapat enam bentuk *intervensi* dalam hubungan internasional dan politik internasional, yaitu :

* 1. **Berbagai jenis tindakan politik rahasia.**

Penyebaran propaganda terselubung melalui siaran pemancar radio gelap, surat kabar bawah tanah, atau selebaran gelap lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan-tindakan politik terselubung yang dilakukan untuk mempengaruhi proses politik dalam negeri yang menjadi sasaran kegiatan tersebut.[[23]](#footnote-24)

* 1. **Demonstrasi kekuatan.**

Salah satu teknik intervensi tradisional yang efektif dengan resiko serta biaya yang rendah ialah memamerkan atau mengancam menggunakan kekuatan baik untuk membantu maupun untuk menghalangi pemberontakan di dalam negeri negara lain.[[24]](#footnote-25)

* 1. **Subversi.**

Subversi adalah penyamaran dalam penggunaan agen-agen yang berasal dari kekuatan eksternal, umumnya dengan bantuan negara-negara anggota kawasan untuk mengubah keadaan politik dalam negeri suatu negara.[[25]](#footnote-26)

* 1. **Perang gerilya ( terutama di organisasikan dan di dukung dari luar negeri,**

Intervensi dengan cara gerilya adalah dengan cara memenagkan penguasaan positif atas sebagian besar penduduk serta berhasil mengasingkan msyarakat dari rezim yang berkuasa. Sasaran dengan cara gerilya adalah mengurangi kekuatan pemerintah terpusat di kota-kota besar, dan memberikan peluang kepada pemberontak untuk mengkonsolidasikan kekuatan.[[26]](#footnote-27)

* 1. **Intervensi militer.**

 Bentuk intervensi militer adalah mengirimkan tentara dalam jumlah besar yang dilakukan untuk menjaga stabilitas rezim yang berkuasa terhadap tindakan pemberontak atau membantu pemberontak dalam menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.[[27]](#footnote-28)

* 1. **Campur tangan diplomatik**

Campur tangan diplomatik dapat berupa komentar terbuka yang merupakan teknik dilakukan oleh pejabat diplomatik mengenai proses dalam negeri (termasuk keputusan luar negeri) negara lain. Campur tangan diplomatik dapat pula berupa teknik mempengaruhi dengan menggunakan instrument ekonomi.[[28]](#footnote-29)

Umumnya pemerintah suatu Negara dalam melakukan intervensi menggunakan gabungan teknik-teknik ini secara serentak, tetapi berbeda dalam studi kasusnya. Krisis politik yang terjadi di Suriah. Berdasarkan pengertan jenis-jenis intervensi, keterlibatan yang dilakukan oleh Rusia merupakan jenis intervensi militer karena pemerintah Rusia mengirimkan dan menempatkan sejumlah kekuatan militer dalam konflik internal Suriah. Rusia mengirimkan sejumlah bantuan militer baik personil maupun persenjataan dan armada militer lainnya kepada pemerintah Suriah yang berkuasa. Namun, Kebijakan pemerintah Amerika Serikat dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri (*Domestic Politic*) yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Adanya dukungan dari sebagian besar element masyarakat Amerika Serikat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka melibatkan diri dalam *intervensi* dari sebuah konflik dan krisis politik suatu negara, termasuk dalam hal ini adalah Suriah.[[29]](#footnote-30) Amerika juga melakukan sebuah intervensi yang berbentuk politik terselubung, dan subversi dimana pemerintah Amerika Serikat dalam melaksanakan kebijakan Luar Negerinya dalam kasus Suriah melakukan sebuah propaganda, pelatihan serta bantuan lainnya terhadap pasukan pemberontak dan jihadis lainnya. Hal ini dipandang bahwa segala bentuk *Intervensi* dilakukan di dalam konflik Suriah.

 Rusia dan Amerika dianggap mengaku bahwa mereka menginginkan sebuah stabilitas kawasan dimana hegemoni terhadap Negara-negara tetap menjadi acuannya. Jika merunut pada pengertiannya, **Teori stabilitas Hegemony** merupakan,

**sebuah pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bagaimana Rezim internasional itu dapat terbentuk berdasarkan perspekstif neo-realisme.**

Ada banyak hipotesis (seperti **Robert Keohane**) dan mengenai relevansi pendekatan ini dalam konstelasi dunia. Namun dapat diambil salah satu thesis yang dinyatakan oleh **Robert Crawford** dalam memandang eksistensi sebuah negara hegemon dalam menciptakan sebuah rezim Internasional untuk mengendalikan perilaku serta tindakan-tindakan negara-negara lainnya untuk menciptakan kondisi stabil (peace) seperti yang diharapkan oleh semua orang di dunia.[[30]](#footnote-31)

Pernyataan inti dari teori stabilitas hegemoni ini yaitu menekankan pada bagaimana sistem dalam suatu rezim itu dapat berjalan dengan bantuan negara hegemon di dalamnya. **Teori stabilitas** hegemoni berjalan melalui proses para hegemon atau penguasa dominan menetapkan suatu sistem hegemoni melalui ketetapannya sendiri, dan menentukan prinsip-prinsip yang menjadi tonggak dasar dari norma-norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan di dalam sistem, dimana kekuatan dan martabat hegemon atau penguasa dominan menetapkan prasyarat penting untuk negara-negara lainnya agar menerima rejim yang internasional yang sedang dijalankan. Negara dominan memelihara sistem hegemoni yang dia ciptakan kemudian memanfaatkan rezim untuk untuk memeperoleh keuntungan maksimum bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan analisis **Crawford** diatas, kondisi yang digambarkan dalam pendekatan ini terbukti jika direpresentasikan oleh negara-negara Barat (Anglo-Saxon) terutama Amerika Serikat sebagai negara hegemon dalam struktur rezim Keamanan Internasional.[[31]](#footnote-32) Dikarenakan Amerika Serikat sebagai Polisi Dunia serta dan juga anggota NATO. Amerika menjalankan fungsinya sebagai Polisi Dunia ditandai dengan *Intervensi* di Suriah yang tentu mengancam keamanan kawasan. Rusia sebagai hegemon baru di Timur Tengah jelas mengganggu eksistensi Amerika Serikat di kawasan tersebut sebagai penjaga stabilitas kawasan. Namun, hal tersebut sudah tidak lagi relevan dimana Rusia meningkatkan kehadirannya secara politik dan militer di kawasan tersebut.

Dengan adanya 2 negara yang menjadi hegemon di kawasan tentu dalam kawasan tersebut akan tercipta suatu ***balance of power***. Pada beragam pengertian***, balance of power*** merupakan konsep yang telah dipegang sepanjang sejarah, praktisi, dan negarawan—statesmen; sehingga perilaku demikian membawa konsekuensi pada tingkat beragam pengertian pada setiap orang berbeda. Walaupun demikian tidak terdapat konsesus resmi definisi balance power secara tepat, beragam pandangan definisi tersebut terletak pada pemahaman pada berbagai istilah yakni sebagai suatu simbol, situasi, kebijakan, dan sistem.[[32]](#footnote-33)

*Balance of power* sebagai reaksi yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional antarnegara yang berdekatan.Menjaga keseimbangan: yang lemah seharusnya tidak dihancurkan oleh negara yang lebih kuat → merupakan prinsip yang membentuk kesatuan pada peta politik sejarah Eropa Modern.

*Balance of power* sebagai kolektif reaksi untuk mencegah terbitnya satu kekuatan dominan yang berpotensi mendesak yang lemah. Suatu penyusunan hubungan sehingga tidak akan ada negara yang berada pada posisi lebih kuat di atas negara-negara lainnya. Seperti halnya poin ketiga yang mana *balance of power* sebagai kolektif reaksi karena adanya kesadaran bersama untuk menghindari munculnya negara yang terkuat di antara yang lainnya.

*Balance of Power* beroperasi melalui aliansi-aliansi yang tidak memberi peluang adanya satu dominan power yang tumbuh lebih kuat sehingga berpotensi mengancam keamanan yang lain. *Balance of power* sebagai strategi untuk menciptakan stabilitator regional melalui keikutsertaan dalam aliansi maupun kelompok kerjasama keamanan yang kolektif.

*Balance of Power:* merujuk pada hubungan aktual antar negara dimana *power* terdistribusi secara paralel pada semua Negara. *Balance of power* merupakan strategi alternatif melakukan atau mempengaruhi distribusi *power*.

Dari berbagai pengertian di atas, tentunya menimbulkan permasalahan tentang bagaimana menggunakan konsep dan istilah *balance of power* dalam hubungan dan politik internasional. Salah satu permasalahan intelektual disebabkan oleh power sebagai suatu konsep dan istilah, adalah interprestasi berbeda pada tiap orang yang berbeda pula. Beberapa diantaranya mengasumsikan “power” tidak hanya mengandung arti kekuatan militer, tetapi juga mengandung implikasi kekuatan politik dan ekonomi—oleh realis disebut tradisional power. Bagi yang lainnya, power tidak hanya menyangkut aktivitas spesifik seperti tersebut di atas, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi perilaku state lain.

Dalam hal ini, keterlibatan Rusia di konflik Suriah merupakan *Balance of Power* bagi Amerika Serikat dalam melakukan pengawasan keamanan di kawasan. Hal tersebut ditandai dengan optimalisasi serangan udara masing-masing angkatan bersenjata ke wilayah ISIS. Rusia telah menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat. Bila ditinjau dari teorinya,

**Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.**

**Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa**.

Jika ditinjau dari pengertian tersebut maka Rusia jelas menjadi ancaman kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah. Dimulai dari ancaman kedaulatan, ancaman ekonomi, hingga ancaman hegemoni.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai Kepentingan Nasional.

Konsep Teori Kepentingan disini diartikan dalam istilah kekuasaan. Konsep ini merupakan penghubung antara pemikiran yang berusaha memahami politik internasional dan realita yang harus dipahami. Konsep ini menentukan politik sebagai lingkungan tindakan dan pengertian yang berdiri sendiri (otonom) terpisah dari lingkungan lainnya, seperti ilmu ekonomi, etika, estetika atau agama. Konsep kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan, memaksakan disiplin intelektual kepada pengamat, memasukkan keteraturan rasional kedalam pokok masalah politik, sehingga memungkinkan pemahaman politik secara teoritis. Interest atau kepentingan sendiri adalah setiap politik luar negeri suatu negara yang didasarkan pada suatu kepentingan yang sifatnya relatif permanen yang meliputi tiga faktor yaitu sifat dasar dari kepentingan nasional yang dilindungi, lingkungan politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kepentingan tersebut, dan kepentingan yang rasional. Adapun mengenai jenis-jenis kepentingan nasional juga terdapat identifikasi yang beragam. Namun **Donald E. Nuechterlin** sedikitnya menyebutkan 4 jenis kepentingan nasional. Dalam pada itu **K.J Holsti** mengidentifikasikan kepentingan nasional dalam 3 klasifikasi yaitu (K.J. Holsti, 1988 ):

1. ***Core values* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara.**
2. ***Middle-range objectives*, biasanya menyangkut kebutuhan memperbaiki derajat perekonomian.**
3. ***Long-range goals*, merupakan sesuatu yang bersifat ideal, misalnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.[[33]](#footnote-34)**

Kepentingan nasional menurut **Hans J Morgenthou** adalah

**kemampuan meminimun negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik dan kultural dari gangguan negara lainnya.**

Dari tinjauan tersebut maka pemimpin negara menentukan kebijakan spesifik terhadap negara lain atau dengan kata lain merupakan kekuatan yang merupakan pilar utama dalam bidang politik nasional maupun internasional yang realistis dan dipenuhi suatu pertentangan untuk menanamkan pengaruhnya di suatu kawasan. Kepentingan nasional menjadi sangat berpengaruh bagi suatu negara untuk memnuhi kebutuhan politik, sosial, maupun ekonomi dan untuk pertahanan keamanan. Secara umum negara yang membawa kepentingan nasionalnya cenderung melakukan intervensi terhadap suatu kawasan. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital bagi suatu negara. Unsur-unsur yang termasuk didalamnya antara lain:

**a. Kedaulatan**

**b. Kelangsungan hidup bangsa dan negara**

**c. Kemerdekaan**

**d. Keutuhan wilayah**

**e. Keamanan Militer**

**f. Kesejahteraan ekonomi**

Menurut konsep diatas intervensi yang dilakukan oleh Rusia dalam konflik internal Suriah adalah untuk mempertahankan identitas politiknya di negara tersebut, dimana Rusia telah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang dengan pemerintahan Suriah yang berkuasa. Seperti perdagangan minyak, persenjataan dan kerjasama bilateral lainnya. Sama halnya dengan Amerika yang memiliki kepentingan strategis di wilayah itu seperti Negara aliansi yang berbatasan dengan Suriah seperti Israel dan Turki.

**Sedangkan menurut Donald E Nutcherlein, “ kepentingan nasional merupakan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai suatu negara yang juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal “.**

Kelompok kepentingan nasional negara besar menurut **Donald E Nuchterlein**:

1. ***Defence Interest***: melindungi negara dan warga negara dari ancaman luar, juga pertahanan sistem konstitusional.
2. ***Economic Interest***: meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui hubungan dengan negara lain dan memperluas eksistensi ekonomi dengan mempromosikan produk-produk ke luar negeri (bilateral atau multilaeral) untuk menjamin kepentingan ekonomi.
3. ***World Order Interest***: kepentingan untuk membangun tata dunia di bidang keamanan dan ekonomi. Bisa melalui kerjasama multilateral untuk kebaikan bersama baik untuk mencapai perdamaian atau perdagangan bebas.
4. ***Ideology Interest***: untuk melindungi dan menyebarkan sejumlah nilai dan kepercayaan kepada pihak lain.

Berdasarkan pengertian kepentingan nasional diatas, intervensi yang dilakukan oleh Rusia merupakan intervensi yang berdasarkan kepada kepentingan ekonomi Rusia di Suriah. Kepentingan ekonomi Rusia yang berada di Suriah adalah adanya kerjasama dalam perdagangan persenjataan Rusia dengan pemerintah Suriah, dimana Rusia mengekspor persenjataan kepada pihak pemerintah Suriah yang berkuasa.

Kepentingan yang relatif sama dan tetap diantara semua negara bangsa akan selalu berkaitan erat dengan keamanan dan kesejahteraan. Kedua hal ini menjadi dasar dalam merumuskan kepentingan nasional dengan bertemunya kepentingan negara yang berbeda, maka terciptalah hubungan yang bersifat kolaborasi baik berupa konflik maupun kerjasama. Berdasarkan penjelasan mengenai kepentingan nasional diatas adalah keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah merupakan karena adanya kepentingan ekonomi Rusia terhadap negara tersebut, yaitu adanya kersajama dalam bidang ekonomi antara pemerintah Rusia dengan Suriah.[[34]](#footnote-35)

**Politik luar negeri** merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. **Politik Luar Negeri** merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.[[35]](#footnote-36) Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu Negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilkinya.[[36]](#footnote-37)

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.[[37]](#footnote-38) Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentutakan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. [[38]](#footnote-39)Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari Negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

**Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.[[39]](#footnote-40)**

Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut **Rosenau**, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.[[40]](#footnote-41)

Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

* **menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;**
* **menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;**
* **menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;**
* **mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;**
* **melaksanakan tindakan yang diperlukan; secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangjau tujuan atau hasil yang dikehendaki.[[41]](#footnote-42)**

Sementara menurut **Holsti**,

“ **lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut**.”[[42]](#footnote-43)

 Kepentingan Nasional yang diperjuangkan oleh Rusia dan Amerika diimplementasikan melalui politik luar negeri masing-masing yang berlandaskan kepada kepentingan nasional. Politik luar negeri rusia yang menyatakan bahwa Suriah merupakan mitra strategis dalam politik, ekonomi dan keamanan. Sedangkan Amerika merupakan polisi Dunia yang mengkapanyekan Demokrasi sebagai tujuan Politik Luar Negeri mereka.

**K.J. Holsti** memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu**:**

* **Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.**
* **Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (short-term), jangka menengah (middleterm), dan jangka panjang (long-term).**
* **Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.[[43]](#footnote-44)**

Dengan ini kita dapat melihat bahwa tujuan jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang Amerika Serikat dan Rusia dipertaruhkan disana. Tujuan jangka pendek yang merupakan resolusi masalah konflik, jangka menengah merupakan stabilitas kawasan dan jangka panjang merupakan prospek perekonomian strategis.

Maka dari itu dijelaskan pula mengenai studi kawasan, agar permasalahan tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. ***Region*** atau **kawasan** diartikan

**sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.**

Meskipun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menyatukan negara dalam satu kawasan**. Hettne** dan **Soderbaun** mengemukakan bahwa “**kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama”**. Dengan demikian, syarat terbentuknya satu kawasan dapat terpenuhi secara geografis dan struktural. Dengan logika ini, maka seharusnya semua kawasan di dunia dapat menjadi sekumpulan negara yang mendeklarasikan diri mereka sebagai satu kawasan yang sama. Namun pada kenyataannya, tidak semua kawasan memiliki intensitas interaksi dan kemajuan yang sama antara satu kawasan dengan yang lainnya.[[44]](#footnote-45) Kawasan Timur tengah yang seharusnya menjadi suatu kawasan yang serumpun karena didasarkan kepada geopolitik yang sama, namun disini kawasan timur tengah merupakan kawasan yang selalu erat kaitannya dengan sebuah konflik. Konflik Suriah merupakan konflik kepentingan antara kepentingan Rusia dengan Amerika Serikat, Rusia dalam kebijakan luar negerinya mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad yang selama ini menjadi perhatian serius oleh Amerika Serikat dan Negara-Negara sekutu AS di kawasan. Melalui kebijakan tersebut, Rusia memperthankan Suriah dan Membantu Suriah dalam Diplomasi maupun Intervensi Militer hal ini dilakukan agar memperjuangkan kepentingan nasionalnnya di Suriah.

Lain halnya dengan Amerika yang mendanai, membentuk dan membantu oposisi serta ekstrimis untuk melawan dan menggulingkan rezim basher Al-Assad. Tidak hanya itu, Amerika membuat koalisi 10 Negara untuk operasi militer di Suriah dengan dalih pemberantasan terror ISIS.

Dengan kebijakan kedua negara ini, stabilitas Timur Tengah menjadi terancam karena adanya 2 kekuatan besar yang saling bertikai dan mencapai sebuah resolusi konflik.

1. **Kerangka Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

**“ Karena persaingan Rusia-Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya Suriah membuat Perang Saudara Suriah berkepanjangan dan meluas ditandai dengan banyaknya pihak yang berkepentingan, tergabung dalam pro-Pemerintah dan Oposisi Pemerintah walaupun ada upaya untuk resolusi konflik di Suriah namun stabilitas Keamanan Regional Kawasan Timur Tengah masih terancam“**

1. **Tabel Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel ( Teoritik )** | **Indikator** **( Empirik )** | **Verifikasi ( Analisis )** |
| Variabel Bebas :“Persaingan Rusia-Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya Suriah membuat perang Suriah berkepanjangan dan meluas ditandai dengan banyaknya Pihak yang Berkepentingan, tergabung dalam Pro-Pemerintah dan Oposisi Pemerintah walaupun ada upaya untuk resolusi konflik di Suriah “ | 1. Intervensi
2. Balance of Power
3. Kepentingan Nasional Rusia
4. Kepentingan Nasional Amerika Serikat.
5. Kepentingan Nasional negara-negara Timur Tengah
 | 1. Pengiriman penasehat politik dan militer terhadap pemerintahan assad yang bertujuan untuk membantu pemerintahan suriah dalam menghadapi pemberontak. (<http://international.sindonews.com/read/1042674/43/suriah-akui-kehadiran-penasihat-militer-rusia-di-wilayahnya-1441805459>).
2. Intervensi militer melalui serangan udara Rusia terhadap ISIS dan front pemberontak Suriah. (<http://news.liputan6.com/read/2330398/seramnya-serangan-udara-rusia-di-suriah>).
3. Persaingan Militer di Suriah melalui operasi militer dan pasokan persenjataan terhadap kedua kubu (<http://indonesia.rbth.com/politics/2015/11/06/akankah-rusia-dan-as-jatuh-dalam-perang-tanding-dalam-konflik-suriah_537943>)
4. Perdagangan Senjata Rusia ke Suriah. Yang meliputi Tank, Pesawat Tempur, Rudal modern. (<http://indonesiaindonesia.com/f/89660-rusia-jual-senjata-canggih-suriah-israel/>)
5. Serangan Udara Amerika Serikat terhadap target ISIS. (<http://www.voaindonesia.com/content/serangan-as-hancurkan-jutaan-dolar-milik-isis-/3141220.html>)
6. Penempatan Pasukan Amerika Serikat di Jordania (<http://indonesian.irib.ir/international/timur-tengah/item/64496-Ribuan_Marinir_AS_Dikerahkan_di_Perbatasan_Yordania-Suriah>)
7. Koalisi Internasional pimpinan AS melakukan serangan udara di Suriah. (<http://international.sindonews.com/read/1033926/43/koalisi-as-gempur-basis-isis-24-jam-non-stop-1439801574>).
 |
| Variabel Terikat :“maka stabilitas Keamanan Regional Kawasan Timur Tengah masih terancam “ | 1. Peningkatan intensitas Konflik
2. Stabilitas Kawasan.
 | 1. Pertempuran Pasukan Pemerintah Suriah dan ISIS (<http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151102_dunia_suriah_isis>)
2. Penempatan Rudal S-400 Rusia mengganggu operasi militer koalisi Amerika Serikat (<https://www.rt.com/news/323815-syria-s-400-us-airstrikes/>)
3. Pangkalan militer Rusia di Tartus, dan Latakia, Suriah. (<http://arrahmahnews.com/2015/10/18/rusia-bangun-pangkalan-militer-gabungan-laut-udara-dan-darat-di-suriah/>)
4. Aliran minyak di Timur Tengah ke Amerika Serikat dan Negara Industri lainnya. (<http://www.kompasiana.com/danial_darwis/kerangka-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-terhadap-timur-tengah-pasca-arab-spring_54f74d32a33311ca2e8b459c>)
5. Memastikan Aktor state, atau non-state untuk tidak memperoleh, membangun senjata pemusnah massal di kawasan (<http://www.kompasiana.com/danial_darwis/kerangka-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-terhadap-timur-tengah-pasca-arab-spring_54f74d32a33311ca2e8b459c>).
6. Penempatan rudal s-400 rusia yang mengancam ruang udara Israel. (<http://indonesian.irib.ir/international/eropa/item/103259-israel-cemaskan-penempatan-s-400-rusia-di-suriah>)
7. Penembakan pesawat tempur Rusia oleh Turki. (<http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151125_dunia_rusia_turki_helikopter>).
8. Bantuan NATO dalam pertahanan udara di Turki sebagai respon peningkatan aktivitas militer Rusia di Suriah. (<http://jurnalintelijen.id/news-54407-ini-reaksi-rusia-saat-nato-ingin-bantu-militer-turki.html>)
9. Migrasi pengungsi Suriah ke Negara Tetangga Suriah. (<http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/09/130903_suriah_pbb>)
10. Teror Bom (<http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160217_dunia_ledakan_ankara>)
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Rusia**

**Amerika Serikat**

**Konflik Suriah**

* **Pemerintah dan Oposisi**
* **Suriah dan ISIS**

**Kepentingan Rusia**

* **Perdagangan Senjata**
* ***Balance of Power***
* **Kepentingan Ekonomi**

**Kepentingan Amerika Serikat**

* **Negara Sekutu**
* **Perdagangan Minyak**
* **Stabilitas Kawasan**

**Amerika Serikat**

* **Intervensi Militer**
* **Bantuan terhadap oposisi**
* **Pelatihan militer**

**Rusia**

* **Intervensi militer**
* **Intervensi Diplomatik**

**Resolusi Konflik**

* ***Arab League Peace Plans 2011-2012***
* ***Russian Peace Intitiative***
* ***Kofi Annan Syrian Peace Plans***
* ***Geneva Conference***

**Instabilitas Timur Tengah**

* **Penempatan Rudal Rusia**
* **Penembakan Pesawat Tempur Rusia oleh Turki**
* **Keterlibatan NATO dalam sistem pertahanan udara di Turki**
* **Migrasi Pengungsi Suriah**
* **Teror Bom**
1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
	1. **Tingkat Analisis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan level analisis s*tate* dan *system* atau Negara-bangsa dan Sistem untuk melihat bagaimana Negara-bangsa mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan serta sistem yang mengaturnya. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada bagaimana suatu Negara memberikan rangsangan dan respon terkait kebijakan Negara lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya serta sistem yang mengatur di dalamnya.

* 1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis yang diantaranya dijabarkan sebagai berikut :

1. **Metode Deskriptif Analisis** : Metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan dan pengantisipasian yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam membuat resolusi mengenai permasalahan di Suriah serta perbedaan pandangan dalam Resolusi di Suriah dengan Rusia, yang didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat actual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena tersebut, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari bagaimana kedua Negara, baik itu Rusia dan Amerika Serikat saling memberikan aksi reaksi di kawasan Timur Tengah.
2. **Metode Historis Analistis** : Metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta khusus mengenai kejadian masa lampau yang berkaitan dengan kerjasama bilateral Rusia dan Suriah, juga dengan sejarah Negara-negara Timur Tengah yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu. Metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomperasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi pada masa yang akan datang.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literature atau referensi baik yang bersumber dari artike-artikel, surat kabar, jurnal, internet, dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan topik dan permasalahan yang tim penulis angkat

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
	1. **Lokasi Penelitian**

Dalam pengumpulan data dan segala bentuk Informasi yang penulis butuhkan untuk digunakan sebagai data penelitian ini bertempat di lokasi sebagai berikut :

1. BPPK Kementerian Luar Negeri Direktorat Organisasi Internasional dan Amerika Eropa Jln. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat.
2. Perpustakaan FISIP Uiversitas Pasundan (UNPAS) Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.
3. Perpustakaan daerah Jawa Barat ( BAPUSIPDA ) Jl. Kawaluyaan, Bandung.
	1. **Lamanya Penelitian**

Dalam pengumpulan dan penyusunan skripsi oleh penulis dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan dalam menyelesaikan skripsi hingga tuntas.

1. **Sistematika Penulisan**

**Bab I : Pendahuluan**

 Merupakan Bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah. Dimana disertakan juga tentang tujuan dan kegunaan penelitian, serta dilengkapi dengan kerangka teoritis dan hipotesis. Yang mana kedua kerangka tersebut dilengkapi dengan penjelasan akan operasionalisasi variable dan indicator, skema kerangka teoritis, asumsi-asumsi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II : Rusia-Amerika Serikat sebagai Negara Hegemon di Timur Tengah**

 Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Umum Negara Rusia dan Amerika Serikat serta kepentingan nasionalnya di Timur Tengah yang menjadikan Rusia-Amerika Serikat sebagai negara hegemon di Timur Tengah.

**Bab III : Tinjauan Umum Konflik Suriah**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan konflik Suriah dan berbagai kebijakan Rusia dan Amerika Serikat mengenai Suriah. Yang di dalamnya dibahas mengenai politik luar negeri kedua negara terhdapap Suriah.

**Bab IV : Pengaruh Kepentingan Rusia-Amerika Serikat dalam Konflik Suriah terhadap Stabilitas Kawasan**

Dalam Bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang di deskripsikan dalam data.

**Bab V : Penutup**

Merupakan Bab penutup dari penulisan penelitian yang perlu memberikan beberapa kesimpulan dari data yang telah di ambil dan di teliti.

1. Husnul Hotimah. *Masa Depan Libya Pasca Moammar Khadafy***.** <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1690/SKRIPSI%20A.%20HUSNUL%20HATIMAH.pdf?sequence=2>.Diakses pada tanggal 1 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibrahim Noor. *Analisis Intervensi Rusia di Suriah*. [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/12/Artikel%20%20(12-02-14-04-56-05).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/12/Artikel%20%20%2812-02-14-04-56-05%29.pdf). Diakses Pada tanggal 1 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-3)
3. Dhwani Adhyatmika Nandanaardi. *Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah*

*dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2012.* <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahid104557653full.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Nopember 2015 [↑](#footnote-ref-4)
4. Adhytia Pahlawan. *Faktor Latar Belakang Intervensi Rusia terhadap Suriah.* <https://www.academia.edu/11897237/Faktor_latar_belakang_intervensi_rusia_terhadap_suriah>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-5)
5. Dhwani Adhyatmika Nandanaardi., Loc.Cit. hal. 142 [↑](#footnote-ref-6)
6. Dikutip dari *Alasan Rusia Memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB*

*dalam Konflik Suriah*. <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25512.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-7)
7. Dhwani Adhyatmika Nandanaardi., *Loc.Cit.* hal.144 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid., hal.145. [↑](#footnote-ref-9)
9. Aan Khoirul Abidin. *Keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah.* <http://sinar-hitam.blogspot.co.id/2012/03/keterlibatan-amerika-serikat-di-timur.html>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Respon Amerika Serikat terhadap Konflik di Suriah Era Barrack Obama.* [*http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=76060&ftyp=potongan&potongan=S1-2014-299674-introduction.pdf*](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=76060&ftyp=potongan&potongan=S1-2014-299674-introduction.pdf)*.* Diakses pada tanggal 1 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-11)
11. Adeodatus Primus Renold. *INTERVENSI MILITER AMERIK SERIKAT DALAM KONFLIK POLITIK DI SURIAH TAHUN 2011.* [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal%204%20september%202014%20(%20Baru)%20(09-11-14-08-13-13).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal%204%20september%202014%20%28%20Baru%29%20%2809-11-14-08-13-13%29.pdf). Diakses pada tanggal 1 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-12)
12. Syahrir Karim. *Politik Internasional*. <http://sahrirka.blogspot.co.id/2010/07/politik-internasional.html>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-13)
13. Natasya Gultom, *Politik Internasional.* <http://tashagultomblog.blogspot.co.id/2011/06/politik-internasional.html>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-14)
14. Yarnis Sikumbang, *Pengantar dan Pengertian Politik Internasional*. Dalam Artikel <https://www.academia.edu/3548244/Politik_Internasional>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
16. Adeodatus Primus Renold. *Loc.Cit.* hlm. 779. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibrahim Noor, *Op.Cit*. Hlm. 1064. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid. hlm. 1067. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* hlm. 1068. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid., hal 1067. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-23)
23. P.Anthonius Sitepi, *Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hal 239. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibrahim Noor, Loc.Cit, hal 1067 [↑](#footnote-ref-25)
25. P.Anthonius Sitepi, Op.Cit, hal.240. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*. hal 241. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid* [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibrahim Noor, Loc.Cit. hal.1067. [↑](#footnote-ref-29)
29. Adeodatus Primus Renold, Op.Cit. hlm. 779. [↑](#footnote-ref-30)
30. Anonim, *Teori Stabilitas Hegemoni*, <https://jaceyscandinavian13.wordpress.com/2011/03/08/teori-stabilitas-hegemoni-hegemonic-stability-theory/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
32. Vioranda, *Power,* *Balance of Power, Hegemony Stability,* <http://viorandafelani.blogspot.co.id/2011/05/power-balance-of-power-teori-stabilitas.html>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-33)
33. Adeodatus Primus Renold. *INTERVENSI MILITER AMERIK SERIKAT DALAM KONFLIK POLITIK DI SURIAH TAHUN 2011.* [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal%204%20september%202014%20(%20Baru)%20(09-11-14-08-13-13).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal%204%20september%202014%20%28%20Baru%29%20%2809-11-14-08-13-13%29.pdf). Diakses pada tanggal 1 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibrahim Noor, Op.Cit., hlm. 1068. [↑](#footnote-ref-35)
35. James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 15. [↑](#footnote-ref-36)
36. James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal. 171, 173. [↑](#footnote-ref-37)
37. Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5. [↑](#footnote-ref-38)
38. Mochtar Mas’oed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal.184. [↑](#footnote-ref-39)
39. James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New

York: The Free Press, hal. 27. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid*, hal. 15. [↑](#footnote-ref-41)
41. Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5. [↑](#footnote-ref-42)
42. K.J. Holsti, 1992. *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta, hal. 21. [↑](#footnote-ref-43)
43. Bruce Russet dan Harvey Starr. 1988. *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co., hal. 190-193. [↑](#footnote-ref-44)
44. Wiwien Apriliani, *Teori Regionalisme,* <https://skiasyik.wordpress.com/2008/03/25/teori-regionalisme/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-45)